

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia negara kesatuan yang menganut sistem demokrasi, dimana semarak pelaksanaan demokrasinya bisa dikatakan sangat tinggi, perbincangan demokrasi di Indonesia bukan hanya tentang bangsa atau jalannya pemerintahan di bumi pertiwi ini mengenal sistem demokrasi. Melainkan tentang implementasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu sendiri merupakan suatu bentuk sistem kepemimpinan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, dimana dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam terbentuknya sebuah pemerintahan. Karena dalam sistem demokrasi ini kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat seutuhnya. Demokrasi adalah sistem yang menganut ideologi terbuka sehingga memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, yang nantinya dapat disalurkan melalui karya-karya ilmiah, media pers ataupun melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Mengingat sistem demokrasi adalah sistem yang dicita citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena sejatinya sistem demokrasi dianggap sebagai matahari yang akan menyinari atau titik terang akan lahirnya tatanan serta sistem perpolitikan di Indonesia yang benar benar demokratis, salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan melalui pemilu yang berdaulat. Karena tujuan diadakan pemilu adalah sebagai suatu proses mekanisme transfer kekuasaan untuk

memilih orang-orang yang nantinya bekerja mewujudkan kehendak umum tersebut. Walaupun sebenarnya pemilihan umum bukanlah satu-satunya aspek dari demokrasi, akan tetapi pemilihan umum menjadi komponen yang sangat penting untuk perubahan yang tepat dan teratur dalam mekanisme pergantian elit politik.

Pelaksanaan pemilu adalah suatu proses dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, setelah amandemen terakhir UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk dalam pemilihan bergilir. Dengan demikian, sampai saat ini, pemilihan umum diadakan untuk memilih Anggota Legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Dalam sistem demokrasi, merupakan hal yang lumrah jika pemilu diadakan sebagai bentuk rotasi dari elit penguasa, dan ini berbeda dengan monarki dengan penguasa tunggal.<sup>1</sup>

Salah satu aspek penunjang diadakannya pemilu adalah dengan adanya keberadaan partai politik. Karena kehadiran partai politik menjadi salah satu aspek penentu yang dapat memastikan jalannya sistem demokrasi, karena dengan tidak adanya partai politik demokrasi bagaikan kereta tanpa kepala atau dengan kata lain sistem demokrasi tidak akan dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Maka dari itu partai politik dituntut harus mampu menjadi salah satu tempat untuk menyalurkan aspirasi bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam berbagai proses pengelolaan negara<sup>2</sup>. Lebih lanjut, partai politik pada hakekatnya

---

<sup>1</sup> *Teori demokrasi dalam wawancara ketatanegaraan perspektif pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum. No. 3. Vol. 16 hlm 413-422. 2009

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 397.

merupakan suprastruktur yang harus dimiliki oleh suatu sistem pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sistem demokrasi. Partai politik sebagai suprastruktur politik berperan sebagai penyeimbang sekaligus pengendali kegiatan pemerintahan untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem politik.<sup>3</sup>

Pada pemilihan anggota parlemen peran partai politik tidak lepas dari peran partai sebagai alat bagi calon wakil rakyat, apalagi partai politik juga memiliki peran dalam sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama kelembagaan. Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen politik dan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas.<sup>4</sup> Selain itu, banyaknya fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik mengharuskan setiap partai politik yang ada untuk membangun kapasitasnya agar dapat menjalankan kapasitasnya secara penuh sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Sebagaimana setiap partai politik dituntut untuk mampu mencari cara untuk mendapatkan simpati rakyat guna untuk mendulang perolehan suara partai sebanyak banyaknya pada saat pesta demokrasi berlangsung.

Pada pelaksanaannya tidak ada demokrasi tanpa partai politik, karena sejatinya partai politik dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Dengan demikian, sejauh mana sistem demokrasi ditentukan oleh tingkat kualitas partai politik yang menciptakannya. Dimana kualitas parpol erat kaitannya dengan proses pelembagaan. Dalam konteks ini, pelembagaan partai politik merupakan bagian

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridha T.R, Dilema pelembagaan partai golongan karya (Golkar) ditingkat lokal: fenomena politik klan, *Cosmogov Vol.2, No.1, April 2016, hlm.160.*

<sup>4</sup> Thomas meyer, *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis FriedrichEbert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia Jalan Kemang Selatan II No. 2A (08) hal 30-31*

dari upaya untuk memastikan demokrasi dijalankan oleh partai politik yang berkualitas<sup>5</sup>. Pada saat yang sama, menurut Huntington, pelebagaan adalah proses dimana organisasi melakukan proses (prosedur) untuk mendapatkan nilai yang stabil. Atau dalam pengertian lain menurut Randall dan Lars, pelebagaan dijelaskan sebagai proses bagi partai menjadi stabil terutama dalam hal pola perilaku yang terintegrasi dengan sikap dan budaya.<sup>6</sup>

Sehingga mau tidak mau partai politik memang sudah seharusnya memperhatikan tingkat pelebagaan partai demi mendukung demokratisasi dan menjamin partai untuk terus eksis dan bertahan dalam kontestasi politik dimasa yang akan datang. Karena fenomenanya saat ini kebanyakan partai politik lebih cenderung terfokus pada pembangunan strategi marketing politik yang instan yaitu untuk mencapai kemenangan saat pemilu berlangsung, padahal sudah seharusnya berfokus kepada peningkatan pelebagaan partai politik yang memiliki orientasi pada jangka panjang mulai dari sebelum Pemilu berlangsung sampai setelah Pemilu diadakan.

Secara sederhananya, pelebagaan partai politik ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dari partai politik, terutama untuk menanggapi setiap permasalahan yang terjadi baik ditingkat internal maupun eksternal. Kapabilitas partai dalam menyelesaikan masalah-masalah internal serta merespons berbagai tuntutan dapat memberikan dampak terutama untuk membangun loyalitas dan

<sup>5</sup> Vicky Randall dan Lars Svasand, "Party Institutionalization and the New Democracies, ECPR Joint Session of Workshop", 26-31 Maret 1999, Mannheim: ECPR, hal. 9-10

<sup>6</sup> *Ibid.*,



memperluas basis dukungan dari partai itu sendiri.<sup>7</sup> Karena dengan kemampuan itulah partai dapat mencapai pelembagaan partai yang kuat disegi nilai ataupun dari segi struktural partai, sebagai implementasinya telah dijelaskan dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terbaru Nomor 8 Tahun 2012 dan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang memberikan pengaturan kepada partai untuk mempersiapkan dirinya dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan agar dapat turut berkompetisi dalam Pemilu.<sup>8</sup> Karena keberhasilan dari pelembagaan partai politik dilihat dari pandangan tentang kemampuan partai untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai di tengah tumbuh dan berkembangnya partisipasi politik. Hal ini tidak lepas dari perolehan suara dalam persaingan di arena pemilihan umum sebagai bentuk kelembagaan partai yang diterapkan di arena legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu betapa pentingnya pelembagaan partai politik untuk ditekankan, terutama untuk memperkuat dan memaksimalkan struktur dari kelembagaan partainya untuk memperoleh suara dari para konstituennya sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan pada kontestasi pemilu dan memperoleh kursi di parlemen. Partai politik dengan kemampuan adaptasi yang baik dapat terus tumbuh dan berkembang, namun sebaliknya, partai-partai yang

---

<sup>7</sup> Firdaus. 2015. *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*. Bandung: Yarma Widya. Hlm. 36.

<sup>8</sup> Teguh Imansyah, *Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1, Nomor 3, Tahun 2012, Hlm: 377.

<sup>9</sup> Firdaus. *Op.cit.*, Hlm. 146.

tidak mengikuti perkembangan politik akan kalah dalam menghadapi persaingan politik yang semakin ketat.

Berbicara penelitian pelebagaan partai, Sebenarnya sudah banyak studi yang dikaji oleh peneliti terdahulu yang menjelaskan tentang pelebagaan partai, seperti, Mardaya, Ubaidullah, dan Ardiansyah yang berjudul tentang Pelebagaan Partai Politik: Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Aceh.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu pelebagaan partai politik DPP PKPI Aceh dalam pertarungan kontestasi pemilu di Aceh dan untuk mengetahui sejauh mana pola rekrutmen calon anggota DPRA DPP PKPI Aceh apakah sudah memperlihatkan tingkat pelebagaan partai politik yang tinggi atau rendah. Selanjutnya ada penelitian dari Khikmawanto dengan judul Pelebagaan Partai Politik: *Assesment derajat keistemewaan* Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang.<sup>11</sup> Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang pelebagaan partai politik terkhusus pada kriteria derajat kesisteman. Terutama pada keberlangsungan dari partai politik itu sendiri, Hal ini terlihat dari munculnya kader-kader partai dengan kapasitas dan komitmen yang besar terhadap dinamika partai ke depan.

---

<sup>10</sup> Mardaya, Ubaidullah, Ardiansyah, Pelebagaan Partai Politik (Studi Kasus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol.4, No. 4, 2019

<sup>11</sup> Khikmawanto, Pelebagaan Partai Politik: (*Assesment derajat keistemewaan* Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra Kota Tangerang).<sup>11</sup> Jurnal Mozaik, Vol. 13 Edisi 1, 2021.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Nanang Suryana, Ari Ganjar Ardiansyah dan Firman Manan yang berjudul pelebagaan partai politik: studi pada partai solidaritas Indonesia kota bandung tahun 2019.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menganalisis pelebagaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Bandung. Terutama ditinjau dari kerangka teori pelebagaan partai politik, penelitian ini menarik dengan beberapa hasilnya dengan fokus pada empat tingkatan pelebagaan. Selain itu juga ada penelitian Agung Pratama Putra, Penelitian ini menjelaskan bahwa pelebagaan partai politik muslim di kota Palembang dapat mempengaruhi hasil pemilu legislatif dan kelangsungan hidup pemilih pada pemilu legislatif tahun 2019 di kota Palembang, partai politik Muslim telah melihat variasi yang sangat signifikan dalam jumlah suara yang diperoleh, jumlah suara yang diberikan dan jumlah kursi untuk anggota legislatif.

Terakhir ada penelitian pelebagaan partai politik yang cenderung merujuk kepada isu dominasi politik yang dilihat dari sudut pandang pelebagaan itu sendiri, dapat melihat penelitian Wessy Juni<sup>13</sup> yang melihat bagaimana dominasi Partai Gerindra Kota Padang yang memenagkan suara terbanyak dua kali berturut turut pada tahun 2014 dan 2019.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh terkait dengan penelitian tentang Pelebagaan Partai

<sup>12</sup> Nanang suryana, Ari ganjar, firman manan, *pelebagaan partai politik : Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019*. Jurnal civic hukum, Vol 5, No.1, Mei 2020.

<sup>13</sup> Wessy Juni Saputri, *Pelebagaan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Padang pada Pemilihan Legislatif tahun 2019*

Amanat Nasional pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019. Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu partai yang lahir setelah reformasi dan masih eksis sampai saat ini. Partai yang di deklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan<sup>14</sup> bisa dibilang memiliki sepak terjang yang cukup baik dan memiliki perkembangan yang populer dan dikenal oleh publik. Buktinya PAN menjadi salah satu dari enam belas partai yang terdaftar dan lolos verifikasi oleh KPU untuk mengikuti kontesatasi Pemilihan Umum serentak pada 2019 lalu.<sup>15</sup>

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 lalu Partai Amanat Nasional wilayah Sumatera Barat adanya peningkatan yang signifikan dalam perolehan kursi legislatif dibandingkan dengan Pileg sebelumnya, baik pada Pileg DPR RI maupun Pileg tingkat Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan dari pada pemilu sebelumnya. Dilihat dari hasil rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat yang menempatkan PAN dan Partai Gerindra sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, sehingga berhasil menempatkan tiga dari masing-masing kadernya untuk maju ke Senayan dari 14 kursi. Kemudian diikuti Partai Demokrat, PKS dan Partai Golkar dengan dua kursi, dan terakhir Partai Nasdem dan PPP yang melengkapinya dengan satu kursi. Dengan rincian perolehan suara Pilkada Sumbar, Partai Gerindra memimpin untuk dapil I Sumbar dengan 336.584 suara. Berikutnya ada PAN dengan 261.007 suara, Demokrat dengan 172.224, PKS dengan 167.103 dan Nasdem dengan 145.769. Sementara itu, pada dapil II di Sumatera Barat, ada partai Gerindra yang berhasil

---

<sup>14</sup> Dikutip dari laman Web, <https://pan.or.id/sejarah-pan/> Dikutip pada tanggal 25 Desember, pukul 16.47 WIB

<sup>15</sup> Dikutip dari lama Web, <https://bakesbangpol.madiunkota.go.id/2018/02/26/14-nama-parpol-lolos-sebagai-peserta-pemilu-2019/>, diakses pada tanggal 18 April 2022, pukul 07.31 WIB.



merebut 223.891 suara. Disusul PKS 199.737 suara, Partai Demokrat 197.834 suara, PAN 151.476 suara, Partai Golkar 79.023 suara, dan PPP 78.378 suara.<sup>16</sup> Berikut dibawah ini hasil perolehan kursi pemilu legislatif DPR RI Tahun 2009-2019 untuk daerah pemilihan Sumatera Barat.

**Tabel 1.1**  
**Hasil Perolehan Kursi Pileg DPR RI Sumatera Barat Tahun 2009,2014 dan 2019**

No	Partai Politik	Perolehan Kursi DPR RI Provinsi Sumatera Barat		
		2009	2014	2019
1	PKB	-	-	-
2	Gerindra	-	2	3
3	PDIP	-	2	-
4	Golkar	3	2	2
5	Nasdem	-	1	1
6	PKS	2	2	2
7	PPP	2	2	1
8	PAN	2	1	3
9	Hanura	-	-	-
10	Demokrat	5	2	2
11	PBB	-	-	-
12	PBR	-	-	-
	<b>Total</b>	14	14	14

*Sumber : Data Sekunder diolah oleh Peneliti*

Tidak hanya sampai disitu, hasil positif PAN untuk peningkatan perolehan kursi di DPR RI juga diikuti oleh peningkatan jumlah kursi yang didapat oleh PAN untuk tingkat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan 10 kursi, jika

<sup>16</sup> Padang Media.com. 2019. Rekap Suara di KPU Sumbar Tuntas, Ini Caleg Terpilih DPR RI Hasil Pemilu 2019. <https://padangmedia.com/rekap-suara-di-kpu-sumbar-tuntas-ini-caleg-terpilih-dpr-ri-hasil-pemilu-2019/> (diakses pada tanggal 9 Maret 2022)

dibandingkan dengan Pemilu dua pemilu sebelumnya, dimana pada pemilu 2009 PAN memperoleh 6 kursi, sedangkan pada pemilu 2014 lalu dengan hanya memperoleh 8 kursi. Dibawah ini adalah rincian perolehan kursi parpol pada pemilu legislatif tahun 2009-2019 di DPRD Provinsi Sumatera Barat:

**Tabel 1.2**  
**Hasil Perolehan Kursi Pileg Sumatera Barat Tahun 2009,2014 dan 2019**

No	Partai Politik	Perolehan Kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat		
		2009	2014	2019
1	PKB	-	1	3
2	Gerindra	4	8	14
3	PDIP	3	4	3
4	Golkar	9	9	8
5	Nasdem	-	6	3
6	PKS	5	7	10
7	PPP	4	8	4
8	<b>PAN</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
9	Hanura	5	5	-
10	Demokrat	14	8	10
11	PBB	3	1	-
12	PBR	2	-	-
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

*Sumber : Data Sekunder diolah oleh Peneliti*

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 dapat terlihat hasil perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, selalu mengalami peningkatan dalam tiga periode pemilihan legislatif sebelumnya. Seperti yang dilihat pada tabel diatas dalam pemilihan legislatif yang dilaksanakn pada 2019 untuk DPRD Provinsi Sumatera Barat PAN memperoleh 10 kursi, dan menempati urutan ketiga dibawah PKS yang sama sama memperoleh 10 kursi, dan berada dibawah partai Gerindra yang memperoleh 14 kursi.

Peningkatan perolehan Kursi yang dicapai oleh Partai Amanat Nasional (PAN) pada Pileg Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 juga diikuti dengan

peningkatan pencapaian kursi yang diraih PAN pada Pileg DPR RI. Prestasi ini membuktikan bahwa peningkatan yang dicapai Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat pada Pemilu 2019 merupakan kelanjutan dari tren positif yang dicapai oleh PAN. Dimana pada Dua Pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya yaitu pada tahun 2009 PAN memperoleh 6 kursi dan pada Pemilihan legislatif 2014 memperoleh 8 kursi, dan yang terbaru pada pemilihan legislatif 2019 lalu PAN memperoleh 10 Kursi.

Berangkat dari data tabel 1.1 dan 1.2 dari hasil peningkatan jumlah kursi Partai Amanat Nasional pada pemilu legislatif baik ditingkat pemilihan anggota DPR RI dan Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019, memperlihatkan capaian peningkatan perolehan kursi dari tahun sebelumnya yang memperoleh 1 kursi, dan pada pemilu Legislatif DPR RI Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 memperoleh 3 kursi. Sedangkan untuk pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat juga mengalami peningkatan yang signifikan yang awalnya 8 kursi pada pileg 2014 dan mengalami peningkatan dengan perolehan 10 kursi.

Tidak hanya itu, menurut Indra Dt. Rajo Lelo selaku Sekretaris DPW PAN

Sumatera Barat mengatakan bahwa:

“Komposisi Caleg PAN didaftarkan, memiliki kapabilitas dan kapasitas tidak diragukan lagi dalam mendulang suara rakyat untuk menangkan PAN kembali di Sumbar, sehingga Insha Allah target 10 kursi DPRD Sumbar dari komposisi Caleg didaftarkan tadi sangat realistis, apalagi ada tujuh caleg Incumbent yang siap bertarung di Derah Pemilihan (Dapil) mereka Kembali”.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Dikutip dari laman web, <https://www.tribunsumbar.com/pan-sumbar-bidik-10-kursi-pemilu-2019/>, Diakses pada tanggal 25 Mei 2022, 09.14 WIB

Tidak sampai disitu saja, Indra Dt. Rajo Lelo juga menambahkan bahwa:

"Peningkatan ini merupakan hasil kerja keras para pengurus dan pengelola di lapangan sehingga kami dapat mengirimkan calon-calon terbaik kami ke parlemen baik di tingkat Sumbar maupun DPR RI. . Selanjutnya, langkah pasti untuk surat suara partai berlambang matahari adalah menempatkan calon terbaik mereka di daerah pemilihan sama, sehingga jumlah suara partai juga meningkat".<sup>18</sup>

Karena secara tidak langsung dengan seorang calon paling baik dan tokoh tersebut sudah berpengalaman ditempatkan di satu daerah pemilihan dan selanjutnya calon yang buruk, tentu suara partai akan tergerus tapi sebaliknya, jika caleg yang memiliki track record dan pengalaman yang baik serta didampingi dengan caleg yang juga baik tentu suara partai juga akan ikut mengalami peningkatan. Seperti Komposisi calon legislatif PAN untuk di DPR RI dapil 1 Sumatera Barat yang berisi incumbent Mhd Asli Chaidir maju kembali, ada Athari Gauthi Ardi yang merupakan anak dari Epyardi Asda dan juga ada mantan Bupati Tanah Datar dua periode Shadiq Pasadigue,<sup>19</sup> yang pasti akan mendongkrak suara partai berlambang matahari tersebut untuk Dapil 1 Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya untuk Dapil 1 Sumatera Barat partai berlambang matahari tersebut berhasil mengirimkan dua kadernya ke Senayan yaitu incumbent Asli Chaidir dan Athari Gauthi. Sedangkan untuk kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat itu terlihat pada Dapil 1 (Kota Padang) yang mampu meloloskan dua kader dan di Dapil 6 (Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya) yang juga meloloskan dua kader .

<sup>18</sup> Republika.co.id. 2019. PAN catat peningkatan suara pemilu 2019 di sumbar, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr311z428/pan-catat-peningkatan-suara-pemilu-2019-di-sumbar> (dikutip tanggal 9 Maret 2022)

<sup>19</sup> Dikutip dari laman web, <https://hariansinggalang.co.id/di-sumbar-ayah-dan-anak-bertarung-ke-senayan/> diakses pada tanggal 25 Mei pukul 09.36 WIB.



Tidak hanya sampai disitu tren Positif PAN Sumatera Barat kembali berlanjut pada Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020, dari 13 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada serentak PAN sukses menghantarkan 8 pasangan unggul di Pilkada Sumatera Barat, lima orang diantaranya adalah kader PAN yang sukses unggul didaerahnya masing masing. Suhatri Bur-Rahmang di Padang Pariaman, Andri Warman-Irwan Fikri di Kabupaten Agam, Epyardi Asda-Jon Firman Pandu, Rusma Yul Anwar – Rudy Hariansyah di Peseisir selatan, Hamsuardi-Risnawanto di Pasaman Barat.<sup>20</sup>

Berdasarkan data diatas peneliti berasumsi bahwa peningkatan jumlah kursi yang diperoleh PAN pada Pemilu 2019 baik itu pada Pileg DPR RI dan Pileg DPRD Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena adanya keharmonisan dalam pelembagaan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumbar, seperti yang telah diutarakan oleh sekretaris DPD PAN Sumbar pada laman Republika. Peningkatan yang diperoleh oleh PAN Sumatera Barat menandakan adanya pelembagaan partai yang cukup baik ditujukan oleh DPW PAN Sumatera Barat. Sejalan dengan sudut pandang yang keempat yang diungkapkan oleh Huntington yaitu *Coherence*, dengan adanya koherensi sebagai ukuran kelembagaan partai, yang berfokus pada integrasi dan solidaritas bahwa kesuksesan pelembagaan partai terletak pada kemampuannya untuk dapat memelihara stabilitas nilai dalam menghadapi partisipasi politik yang terus tumbuh dan berkembang. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan adanya hubungan antara perolehan suara pada

---

<sup>20</sup> Dikutip dari laman Web, <https://sumbar.antaranews.com/berita/403152/pan-klaim-menang-di-empat-pilkada-serentak-di-sumbar> , diakses pada tanggal 19 April 2022, Pukul 08.23 WIB

persaingan daerah pemilihan umum sebagai perwujudan dari pelebagaan partai yang dilakukan di arena pemilu legislatif dan eksekutif pada periode sebelumnya.<sup>21</sup>

Dimana Partai Amanat Nasional (PAN) Sumatera Barat cukup mampu untuk menjalankan peranannya dalam persoalan koherensi pelebagaan partai seperti terbangunnya hubungan yang instens antara partai dengan setiap kader sehingga terjalinnya hubungan yang harmonis sehingga keselaran antara tujuan dan arah partai PAN dapat tercapai, hal ini terlihat dari adanya keharmonisan di internal partai mulai dari tingkatan pusat hingga daerah.

Selanjutnya, berdasarkan fenomena yang terjadi peneliti melihat dari 10 kader PAN yang terpilih pada pileg 2019 lalu itu, munculnya kader kader muda partai. Dimana dari sepeuluh kader PAN terpilih itu ada 4 darah muda Partai Amanat Nasional yang terpilih, Muhammad Ikhbal dari Dapil 2 (Padang Pariaman dan Kota Pariaman), Syahrul Furqan dan Yosrizal dari Dapil 6 (Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya) dan yang terakhir ada nama Muhayatul dari Dapil 8 (Pesisir Selatan dan Mentawai). Hal ini sesuai dengan kemampuan pelebagaan pertama menurut Huntington yaitu, *Adaptability*, Adaptasi mengacu pada konsep kemampuan suatu bagian untuk beradaptasi dengan lingkungannya.<sup>22</sup> Salah satunya adaptasi partai dengan menyesuaikan dengan peta pertarungan politik yang mulai dominan diikuti oleh generasi milenial

<sup>21</sup> Firdaus, *Constitutional Engineering: Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi dan Sistem Kepartaian*, (Yrama Widya: Bandung, 2015), hlm. 145.

<sup>22</sup> *Ibid.*,

atau kaula muda. Kerja keras PAN dapat dilihat dari mengirimkan kader kader muda terbaik partai berlambang matahari tersebut

Dapat dilihat dari semakin muda suatu organisasi dapat menyesuaikan diri, maka semakin tinggi pula tingkat pelebagaanya. Seperti adaptasi dari partai itu sendiri. Semakin lama usia partai hidup maka semakin muda pemimpinnya. Seperti yang terlihat pada anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat terpilih dari 10 kader PAN yang terpilih tiga diantaranya adalah petahana yaitu: Indra dt. Rajo Lelo Dapil 1 (Kota Padang), Muzli M. Nur Dapil 4 (Pasaman dan Pasaman Barat) dan yang terakhir ada Ahmad Rius dari Dapil 7 (Kabupaten Solok, Kota Solok dan Solok Selatan) bisa dibilang karena ketokohnya dan karena pengalaman yang baik selama menjabat makanya Kembali dipercaya. Tujuh kader terpilih lainnya berisikan empat kader muda partai yaitu: Muhammad Ikhbal (Dapil 2), Syahrul Furqan dan Yosrizal (Dapil 6) dan Muhayul (Dapil 8)<sup>23</sup> yang menandakan adanya kaderasi partai yang baik dari DPW PAN Sumatera Barat. Karena dari 65 kursi DPRD Sumbar 15 merupakan generasi milenial dengan usia di bawah 50 tahun, dan 4 diantaranya yang adalah kader muda PAN. Selanjutnya ada kemampuan *Complexity*, kemampuan yang lebih melihat kepada variasi organ untuk dapat mengoptimalkan setiap fungsi dari partai dalam mengelola beragam nilai dan kepentingan. Terakhir, ada kemampuan sisi dari sudut pandang *Otonomy*, menunjukkan adanya kemerdekaan partai dengan mengambil posisi politik tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari luar partai. Terutama dalam

<sup>23</sup> Dikutip dari laman web, <https://www.tribunsumbar.com/hasil-pemilu-2019-wajah-melenial-dprd-sumbar/> Diakses pada tanggal 26 Mei 2022, Pukul 13.20 WIB

penetapan kader yang akan dicalonkan agar tujuan partai dapat tercapai terutama dalam perolehan suara partai salah satu caranya seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris DPW PAN Sumatera Barat Indra Dt. Rajo Lelo dalam wawancara dengan Republika.<sup>24</sup>

Karena secara tidak langsung dengan kandidat terbaik ditempatkan di daerah pemilihan dan diikuti oleh kandidat yang buruk, tentu saja suara partai akan tergerus tetapi kandidat yang baik datang dengan kandidat yang baik, tentu saja suara Suara partai akan meningkat pesat yang berdampak besar pada perolehan suara Partai Amanat Nasional di tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2019 lalu. Terkhusus dari segi pelebagaan koherensi menurut Huntington yang mana secara sederhana koherensi bertujuan dalam menyelaraskan tujuan dan arah partai. Buktinya dengan adanya keharmonisan dalam pelebagaan partai, sehingga PAN Sumatera Barat mampu menempatkan 10 kadernya di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Periode 2019-2024). Berdasarkan asumsi peneliti yang telah peneliti paparkan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pelebagaan Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat tahun 2019?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pelebagaan Partai Amanat Nasional

<sup>24</sup> Republika.co.id. 2019. PAN catat peningkatan suara pemilu 2019 di sumbar, <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr311z428/pan-catat-peningkatan-suara-pemilu-2019-di-sumbar> (dikutip tanggal 9 Maret 2022)



serta pengaruh pelebagaan PAN terhadap peningkatan perolehan kursi Partai Amanat Nasional (PAN) pada pemilu legislatif DPRD Sumatera Barat tahun 2019.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Akademis**

Pada tataran akademik, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi hal baru dan membawa variasi baru bagi disiplin ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan pelebagaan partai politik. Sebab, pelebagaan partai ini tentu menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk ditelaah secara ilmiah, yakni pelebagaan partai dengan meningkatkan perebutan kursi parlemen. Kemudian, pada tataran akademik, penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber kajian lain yang ingin mengkaji fenomena dan permasalahan lain terkait bidang kepartaian, pemilihan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ilmiah ini dianggap mampu menjadi salah satu dokumen evaluasi dan sebagai bahan catatan kritis bagi kelanjutan dan langkah strategis pelebagaan partai politik pada kontestasi Pemilu selanjutnya.